

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Etnis Tionghoa di Indonesia, baik sebagai individu atau kelompok pada perkembangannya kini berada pada serangkaian sejarah masa lalu, masa kini atau masa yang akan datang. Keberadaan etnis Tionghoa sangat ditentukan dengan keberadaan kelompok sosial lainnya.

Menjadi Tionghoa di Indonesia, tidaklah mudah seperti apa yang di bayangkan. Selain mereka hasil dari proses ‘pelabelan politis’, juga berkaitan dengan konsep Ras, kelas, agama dan kebudayaan. Karena pelabelan yang multi tersebut, Tionghoa menjadi kompleks, unik dan menarik untuk dilakukan penelitiannya. Bahkan etnik Tionghoa menjadi sangat unik akibat dari terbentuknya dalam sejarah bangsa Indonesia yang sangat berbeda dengan negara lainnya. Diskursus tentang identitas etnis Tionghoa pada masa otoritarian Soeharto, sangat ditentukan oleh negara. Sejak memasuki masa pasca Reformasi identitas etnis Tionghoa di Indonesia kini menjadi terbuka untuk dilakukan tafsir dan diartikan ulang. Artinya sebagai aktor sosial, etnis Tionghoa Indonesia memiliki kesempatan untuk menegosiasikan kembali identitas mereka. Di banyak tempat, perubahan dari satu rejim ke rejim lain di barengi

dengan kecenderungan masyarakat berpegang lebih erat kepada identitas, salah satunya adalah identitas agama.<sup>1</sup>

Dalam kaitannya dengan etnis Tionghoa inilah, penulis ingin mengetahui bagaimana agama yang berperan sebagai “agen” dalam proses bernegosiasi, saling membaca, menyepakati atau membentuk identitas etnis Tionghoa, dan identitas ke-Indonesiaan terutama pada masa pasca reformasi. Sekaligus juga untuk menjawab pertanyaan, apa artinya menjadi etnis Tionghoa Muslim Indonesia di masa kini.

Dalam masyarakat multikultur seperti di Indonesia, perjumpaan antar berbagai kelompok sering melahirkan persoalan atau konflik. Setidaknya alasan masyarakat ingin memiliki ikatan yang mantap di antara kelompoknya, kerap kali menjadikan nilai-nilai kebudayaan sebagai media untuk menyatukan anggota-anggotanya. Tetapi pada saat bersamaan tiap kelompok etnis tertentu juga memiliki kekhasan dan keunikan nilai dan kebudayaan sendiri-sendiri. Dalam keadaan seperti ini, kerap kali perjumpaan antar berbagai kelompok tersebut selalu menghasilkan respon baik dalam bentuk negosiasi, menyepakati, menerima atau menolak dengan syarat tertentu dan tanpa syarat.<sup>2</sup> Dalam hubungan antar kelompok mayoritas dan minoritas, juga berlaku hukum yang sama. Di antara keduanya melahirkan respon penerimaan, penolakan, menerima sebagian, adaptasi atau menerima dengan syarat. Kelompok mayoritas misalnya

---

<sup>1</sup> Parekh, B., *A New Politics of Identity: Political Principles for an Interdependent World*, New York; Palgrave MacMillan. Juga di kutip, Darwin Darmawan, *Identitas Hibrid Orang Cina*, (Gading Plubising, Yogyakarta 2014). 388

<sup>2</sup> Seperti di terangkan Dr. Bambang Qomaruzzaman. Dalam mata kuliah “ Cultural Studies “ di prodi Religious Studies 2018. Menegaskan bahwa dalam perjumpaan antara berbagai gagasan atau “ide” di dalam kebudayaan kerap kali melahirkan respon berbeda-beda. Mulai dari penolakan, penerimaan, adaptasi, atau menerima dan menolak dengan syarat tertentu.

bisa menerima bagian tertentu dari kelompok minoritas, tetapi menolak sebagian dari identitas lainnya.

Proses dialog antar kelompok sosial mayoritas-minoritas, Tionghoa-Pribumi, Eropa-Pribumi, diselesaikan oleh Negara berdasarkan kepentingan stabilitas, persatuan dan kesatuan. Negara berharap di antara kelompok sosial dan kebudayaan tersebut adanya penerimaan dan adaptasi. Pada pemerintah kolonial Belanda, perbedaan status etnis antarwarga diberlakukan secara tegas. Orang-orang Eropa menempati kelas sosial tertinggi, mereka berhak mendapatkan fasilitas publik paling baik. Etnis Tionghoa digolongkan sebagai “Timur Asing” (*Vreemde Oosterlingen*), berada di posisi kedua bersama orang Arab dan India. Sementara orang pribumi (*inlander*) adalah pihak yang paling dirugikan karena berada pada kelas sosial terendah.<sup>3</sup>

Akibat dari warisan Kolonial itu juga menurut Chang Yau Hoon<sup>4</sup> etnis Tionghoa yang sudah lama tinggal di Indonesia masih dianggap ‘orang asing’ atau ‘pendatang’, hasil dari konsep ke Indonesiaan identik dengan pribumi dan bukan kewarganegaraan. Selain itu, menurut Chang perilaku kultural orang Tionghoa yang di mata pribumi sebagai ‘orang kaya’ ikut mengentalkan stereotipe Tionghoa sekaligus menstigmakan secara sosial sebagai sosial kelas eksklusif. Penyelesaian negara terhadap status perbedaan kelompok minoritas dan mayoritas dengan tegas di masa kolonial Belanda tersebut, berujung dratis dengan terjadinya tragedi 1740 di Batavia. Tragedi tersebut meninggalkan trauma besar bagi etnis Tionghoa. Pada masa Kolonial, etnis Tionghoa akhirnya

---

<sup>3</sup> Susetno, *Stereotip dan Relasi antar Etnis Cina dan Etnis Jawa pada Mahasiswa di Semarang*, (Tesis, Depok; Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2002). 16.

<sup>4</sup> Chang Yau Hoon, *Chinese Identity In Post Soeharto Indonesia*, 2008

banyak melakukan mobilisasi sosial upaya untuk meminimalisir konflik. Banyak dari mereka mengikuti pendidikan ala Eropa, berpakaian termasuk juga cara mereka beragama. Etnis Tionghoa banyak memeluk agama Kristen Protestan atau Katholik sebagai agama mayoritas orang Eropa pada saat itu.<sup>5</sup>

Pada masa rezim Soekarno, perlakuan terhadap etnis Tionghoa negara mengeluarkan kebijakan asimilasi dan adaptasi. Jika etnis Tionghoa ingin di terima sebagai warga negara yang setara, maka perlu perbauran dengan budaya nasional. Selain meninggalkan identitas nilai dan budaya Tionghoa juga menjadikannya sama dengan identitas nasional.<sup>6</sup> Menurut Arif Budiman, kedua kebijakan tersebut dijalankan bersamaan dengan terbentuknya Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan (BAPERKI). Sementara pada masa rezim Soeharto, dikeluarkan kebijakan asimilasi total. Asimilasi total ini memaksa etnis Tionghoa menghilangkan segala bentuk identitas, budaya dan tradisi mereka.<sup>7</sup> Menurut Lindsey, segala bentuk yang ada kaitanya dengan ke-Tionghoan dilarang keras. Pendidikan, aksara Tionghoa, barang-barang beraksara Tionghoa dilarang pemerintah. Berbagai Ekspresi keagamaan dan kebudayaan Tionghoa pada saat itu dianggap sesuatu yang tidak wajar untuk di pertontonkan kepada masyarakat. Maka pada masa rezim Soeharto BAPERKI dibubarkan, karena dianggap sebagai kendaraan politik dari partai komunis. Program asimilasi total yang hampir berlangsung 32 tahun berhasil

---

<sup>5</sup> Afthonul Afif, *Identitas Tionghoa Muslim Indonesia*, (Penerbit Kepik, Cimanggis Depok 2012) 22.

<sup>6</sup> Budiman A, *Potret of The Chinese in Post Soeharto Indonesia*. 2005; (Pasir Panjang, Institut Of Southeast Asia Studies). 102

<sup>7</sup> Lindsey T, *Chinese Indonesians; Remembering, Distorting, Forgetting*. (Pasing Panjang, Institut Of Southeast Asia Studies 2005). 200

mengkonstruksi identitas ke Tionghoan. Hasil penelitian dari Dawis 2010, menunjukkan bahwa orang Tionghoa yang lahir tahun 1966, akan merasakan dirinya sebagai orang Indonesia kemudian menjadi orang Tionghoa.<sup>8</sup>

Apalah artinya kalau dikatakan orang Tionghoa menjadi semakin Indonesia? dalam upaya mencari Jawaban Darwin Darmawan di tahun 2014 melakukan penelitian tentang identitas Tionghoa. Artinya sebuah identitas etnis Tionghoa bukan sesuatu yang baku, homogen. Jika orang merasa dimarginalkan dan diperlakukan tidak adil kemungkinan besar mereka tidak mau untuk menjadi bagian dari Indonesia.<sup>9</sup> Perspektif ini lah kemudian oleh Darwin dipakai untuk memandang relasi etnis Tionghoa bersama etnis lainnya di Indonesia. Jika kebijakan asimilasi total dianggap berhasil membuat etnis Tionghoa telah menjadi bagian dari Indonesia. Tetapi kini bagaimana tanggapan dari bangsa Indonesia sendiri. Jika etnis Tionghoa merasa sudah menjadi bagian dari Indonesia, sementara bangsa Indonesia menolak keberadaannya maka identitas ke Indonesiaan rasanya perlu dilakukan negosiasi ulang. Tragedi Mei 1998 di beberapa kota besar di Indonesia, adalah nyata bahwa etnis Tionghoa belum sepenuhnya diterima sebagai pribumi. Wajah etnis Tionghoa sudah menjadi Indonesia tetapi dianggap bukan bagian dari Indonesia.<sup>10</sup>

Pasca tragedi kerusuhan Mei 98, menurut Chang Yau Hoon, orang-orang etnis Tionghoa telah memikirkan kembali atas keberadaannya dan identitasnya. Hampir 32 tahun etnis Tionghoa dipaksa meninggalkan identitasnya. Ketika iklim politik serta kebijakan pemerintah berubah, tentu akan ada perubahan

---

<sup>8</sup> Dawis, A, *Orang Indonesia Tionghoa Mencari Identitas*, (Jakarta Grafiti. 2010 ). 20

<sup>9</sup> Darmawan Darwin, *Identitas Hibrid Orang Cina*, (LKIS Yogyakarta, 2014) 7.

<sup>10</sup> Dawis, A, 2010. 35.

orientasi dan pemahaman mereka tentang menjadi Tionghoa Indonesia. Penelitian Chang Yau Hoon, tentang identitas orang Tionghoa pasca Soeharto dapat disimpulkan bahwa sebenarnya identitas orang Tionghoa itu cair, dinamis dan heterogen. Mereka adalah subjek yang aktif dan dinamis, yang selalu melakukan negosiasi antara identitas ke Tionghoan dalam konteks ke Indonesiaan.

Salah satu konstruksi identitas hasil negosiasi di antaranya adalah dengan cara memeluk agama Islam dan menjadi Muslim. Salah satu dari himbuan asimilasi total tersebut menganjurkan untuk memeluk agama Islam di kalangan etnis Tionghoa. Dengan memeluk Islam, orang-orang Tionghoa tentu akan lebih mudah diterima oleh golongan pribumi, karena mereka telah memiliki kesamaan identitas sebagai umat Islam.<sup>11</sup>

Muslim Tionghoa atau Tionghoa Muslim memang terdengar aneh. Masa ada Tionghoa Muslim atau Muslim Tionghoa, mustahil keduanya disatukan dalam satu kalimat. Padahal dalam kurun sejarah Tionghoa di Indonesia, banyak etnis Tionghoa telah menjadi Muslim. Mereka tidak ada masalah dengan identitas Tionghoa, sekaligus membuktikan tentang ke musliman yang taat. Hubungan keduanya memang bukan fenomena baru, sebelum penjajah Hindia datang ke Indonesia orang Tionghoa dan Muslim sudah hadir. Etnis Tionghoa yang datang ke Indonesia umumnya imigran dari Guanzhou dan Guangdong. Mereka masuk ke Nusantara dalam jumlah kelompok kecil dengan motif memperbaiki taraf hidup sekaligus menghindari konflik politik yang terjadi di

---

<sup>11</sup> Afthonul Afif, 2012. 82.

negaranya. Kedatangan para imigran dari Tionghoa tentunya disambut baik penduduk Nusantara, terjadilah interaksi kebudayaan sampai terjadi perkawinan campuran antara imigran etnis Tionghoa dan perempuan-perempuan pribumi. Dari perkawinan kedua etnis tersebut maka lahirlah generasi baru yang oleh Afthonul Afif disebut “Tionghoa Peranakan”.

Data sejarah di atas tentu membuktikan bahwa etnis Tionghoa Muslim jaman sebelum Belanda menginjakkan kakinya di Indonesia, telah berhasil melakukan asimilasi dengan penduduk pribumi. Namun hubungan harmonis antara keduanya hancur setelah kolonialisme Belanda memberlakukan apa yang disebut dengan politik pecah belah “*devide’et impera*”. Yang membuat etnis Tionghoa terpisah dengan penduduk pribumi. Tindakan diskriminatif Belanda terhadap etnis Tionghoa, dilanjutkan dengan dikeluarkannya peraturan yang memasukkan etnis keturunan Tionghoa ke dalam kelompok pribumi (*inlader*). Jika etnis Tionghoa ketahuan mempraktekkan tradisi, adat istiadat atau memeluk agama (Islam) maka derajatnya akan diturunkan. Dengan demikian, orang-orang Tionghoa yang memeluk Islam secara otomatis akan diturunkan derajatnya menjadi sama dengan penduduk pribumi.<sup>12</sup>

Konsekwensi lanjutan dari peraturan tersebut adalah kecenderungan di kalangan orang-orang Tionghoa non Muslim untuk tidak mengakui anggota keluarga mereka yang memeluk Islam, karena Islam dianggap identik dengan

---

<sup>12</sup> The Siauw Giap, “*Religion And Overseas Chinese Assimilation In Southes Asia Countries*”, in *Revue du sud-East Asiantique*, No 2, P 67 dan Afthonul Afif, *Identitas Tionghoa Muslim Indonesia*, (Penerbit Kepik, Cimanggis Depok 2012). 31

penduduk pribumi yang bodoh, miskin dan terbelakang.<sup>13</sup> Kondisi inilah yang dianggap sebagai awal dari merenggangnya hubungan antara masyarakat pribumi dan etnis Tionghoa. Beragam stereotip negatif tentang Islam yang dikaitkan dengan penduduk pribumi hingga sekarang masih berkembang di kalangan orang-orang Tionghoa, sebut saja terbelakang, miskin, bodoh, pemalas, tidak toleran dan sebagainya.<sup>14</sup> Karena faktor itu pula kebanyakan keluarga Tionghoa di Indonesia kurang simpatik terhadap anggota keluarga mereka yang masuk Islam. Bahkan sering kali berujung pada penolakan sebagai bagian dari keluarga sendiri.<sup>15</sup> Tidak jarang etnis Tionghoa yang memutuskan untuk masuk agama Islam merasa dirinya terasing dan mendapatkan perlakuan diskriminatif dari keluarganya sendiri.<sup>16</sup> Bahkan menyebut mereka “Tionghoa Muslim” sebagai “minoritas” dari yang “minoritas”. Sebagai orang Tionghoa mereka menjadi minoritas dihadapan masyarakat pribumi, sebagai seorang muslim mereka juga minoritas di tengah etnis Tionghoa yang umumnya non Muslim.<sup>17</sup>

Salah satu agensi yang berperan dalam proses negosiasi identitas etnis Tionghoa adalah “agama”. Menurut Chang Yau Hoon Agama Kristen Protestan dan Katolik telah menjadi agensi dalam negosiasi antara ke Tionghoan, ke Indonesiaan dan ke-Kristenan. Sementara menurut Afif Agama Islam juga menjadi agensi dalam negosiasi identitas, bersama ke Tionghoan dan ke-

---

<sup>13</sup> Ali M, “*Chinese Muslim in Colonial and Postcolonial Indonesia*”, (in *Islam in Southeast Asia* Vol 7, Issu 2, Spring 2007), p. 1-22

<sup>14</sup> Jacobson, M “*Chinese Muslim In Indonesia; Politik, Economi, Faith, and expediency*” (Southeast Asia Research Center Working Paper series no 54, November 2003).1-40

<sup>15</sup> The Siauw Giap, 1993: 83-84.

<sup>16</sup> Ali M. 2010.1-22.

<sup>17</sup> Afthonul Afif, 2012. 9



Indonesiaan. Agama dalam hal ini Kristen, Islam, Budha, dan Kongfuchu telah menjadi agensi dalam negosiasi yang dilakukan etnis Tionghoa dalam menemukan identitasnya. Tentang hal tersebut Parekh mengatakan:

*“pada saat terjadi perubahan identitas etnik Tionghoa, orang akan kembali kepada agama untuk mendapatkan kepastian moral, stabilitas dan prinsip-prinsip untuk hidup pribadi dan kelompok”*.<sup>18</sup>

Misalnya Islam sebagai agama juga dijadikan media asimilasi bagi etnis Tionghoa sejak tahun 1961. Haji Yap Siong dan Haji Abdul Karim Oey mendirikan sebuah organisasi yang disebut dengan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI).<sup>19</sup> Sebuah organisasi muslim Tionghoa yang mewadahi seluruh kepentingan politik dan sosial etnis Tionghoa. Sejak Haji Abdul Karim Oey meninggal dunia tahun 1988, para pengikutnya mendirikan Yayasan Kariem Oey. Yayasan tersebut berperan selain mendekatkan Islam dengan etnis Tionghoa juga memberikan bimbingan kepada seluruh etnis Tionghoa yang baru masuk Islam. Untuk mengenang jasa almarhum Karim Oey kemudian para pengurus yayasan mendirikan masjid yang diberi nama Lautze. Masjid Lautze pertama dibangun di kota Jakarta, yang kemudian secara administrasi menjadi kantor pusat, sementara di Kota Bandung masjid Lautze berlokasi di Jalan Embong, yang kemudian secara administrasi dijadikan masjid daerah.

Masjid Lautze di kota Bandung, akar sejarahnya adalah masjid etnik Tionghoa. Karena dianggap masjid etnik tertentu, maka masjid Lautze masih

---

<sup>18</sup> Parekh, B., *A New Politics of Identity: Political Principles for an Interdependent World*, New York; Palgrave MacMillan. Juga di kutip, Darwin Darmawan, *Identitas Hibrid Orang Cina*, (Gading Plubising, Yogyakarta 2014). 40

<sup>19</sup> Afthonul Afif, 2012. 9

dianggap non-pribumi. Upaya untuk menghilangkan kesan masjid etnik Tionghoa, pengelola masjid berusaha menghilangkan identitas ke Tionghoannya, karena etnis Tionghoa dianggap memiliki agama asing meskipun masih sama Islam. Misalnya anggota masjid etnis Tionghoa ini kerap kali membuktikan bahwa meskipun mereka beretnis Tionghoa tetapi mereka masih bisa menjadi Islam. Ini terjadi karena umumnya mereka merivitalisasi identitas Tionghoanya, bukan sebagai agama tetapi hanya sebagai budaya.

Program asimilasi total oleh pemerintah di masa Orde Baru, telah berhasil membangun citra negatif identitas Masjid Lautze sebagai representasi masjid etnik Muslim Tionghoa. Bersama berjalan waktu masjid Lautze berusaha untuk menjadi “Indonesia”. Dari negosiasi awal inilah penulis menemukan tiga agensi yang berpengaruh dalam mengkonstruksi identitas yaitu identitas Muslim, Tionghoa dan Indonesia. Ketiga agensi tersebut telah dan sedang melakukan negosiasi dalam membentuk identitas barunya.

Komunitas muslim etnik Tionghoa, telah melakukan negosiasi dan kontestasi antara dirinya sebagai seorang Muslim, Tionghoa dan Indonesia. Artinya penulis menemukan muslim etnik Tionghoa di kota Bandung yang sebelumnya berperan sebagai keturunan etnik Tionghoa, kini sedang berusaha untuk menjadi “Indonesia” sekaligus telah mengalami kontestasi dengan proses identifikasi etnis Tionghoa terbaru yakni Muslim.

Negosiasi lebih kepada dialogis dari perbedaan kultur untuk menemukan autentik dan originalitas. Negosiasi yang dilakukan etnik Tionghoa muslim semacam menemukan kembali sisi yang hilang, yang dirampok atau sengaja

dihilangkan oleh sang penguasa. Negosiasi etnik tionghoa muslim tersebut memang melibihi logika oposisi-biner, yang menerima satu dan menolak yang lain, mengutuk yang satu memuji yang satu. Biasanya negosiasi selalu memerlukan ‘ruang ke tiga’, dalam hal ini etnik Tionghoa muslim berposisi menjadi pengisi ruang ketiga tersebut. sebagai tempat perjumpaan sejumlah perbedaan kultur, ide dan pemaknaan. Dengan dilakukan negosiasi di ruang ketiga tersebut, etnis Tionghoa muslim bisa menuliskan kembali identitas terbarunya. Sebagai hasil dari negosiasi tersebut etnis Tionghoa muslim bisa membangun kembali narasi hidupnya.

Dalam menemukan identitas terbarunya, etnis Tionghoa telah melakukan banyak cara, salah satunya dengan kontestasi. Artinya kontestasi itu, adalah upaya menekan identitas lama kemudian memunculkan identitas baru.<sup>20</sup> Mereka menekan identitas Tionghoa, kemudian memunculkan identitas Indonesia dan terakhir identitas Muslim. Menemukannya identitas baru sebagai upaya pemaknaan baru, itu hasil kerja etnis Tionghoa muslim sebagai “agensi”. Pada dasarnya proses agensi karena etnis Tionghoa menyadari atas otonominya sebagai aktor kehidupan sosial dan kemampuannya menjadi pengarang yang menuliskan identitas sosialnya. Dalam perspektif teori postkolonial agensi muncul sebagai buah dari negosiasi yang memunculkan kesadaran sosial atas narasi historis diri. Agensi berkaitan dengan upaya menemukan kembali dan

---

<sup>20</sup> Setyo Budi Imam, *Politik Identitas Animal Pop Dance; Sub Budaya dan Gaya Hidup Hibrid*, (Jurnal Sosiologi Reflektif, Volume 12 No 1, Oktober 2017). 20-45

memperbaiki apa yang telah hilang. Dengan demikian agensi berperan sebagai “*a moment of authorship*”.<sup>21</sup>

Dalam kajian Postkolonial negosiasi antara ke Tionghoan, ke Indonesiaan dan ke Musliman inilah membentuk identitas Hibrid. Adanya tiga agensi dikomunitas Muslim etnik Tionghoa di kota Bandung itulah yang menjadi daya tarik penulis untuk melakukan penelitian. Penulis secara khusus meneliti, identitas Muslim Tionghoa Indonesia, dengan subjek penelitiannya komunitas muslim etnik Tionghoa di Bandung. Bagaimana peran agama dalam proses negosiasi identitas yang terjadi antara Tionghoa, Indonesia dan Islam.

Melakukan penelitian etnis minoritas Tionghoa Muslim menjadi penting, karena selama penulis melakukan survey literatur belum ada yang membahasnya, terutama dengan pendekatan Postkolonial. Perbedaan pendekatan terhadap objek penelitian sebagai langkah lanjutan untuk menemukan makna lebih dalam dari komunitas etnik Tionghoa. Sebelumnya sudah banyak yang melakukan penelitian yang sama, namun di lihat dari arsitektur kebudayaan oleh Reza, mahasiswa pasca ITB. Dosen Unisba Ismatul Maria Ulfah, Nia Kurniati, Komarudin Shaleh di tahun 2014 penelitian komunitas etnik Tionghoa Lautze dilihat dalam aspek komunikasi dengan setting Pribumi non Pribumi.

---

<sup>21</sup> Samsul Huda, *Orang Indonesia Tionghoa dan Persoalan identitas*, (Jurnal Kontektualita, Volume 25 No 1, 2010 ). 30-50.

## **B. Rumusan Masalah**

Pada masa pasca reformasi identitas Etnik Tionghoa Muslim di kota Bandung ada peluang untuk dilakukan kontruksi ulang, setelah mengalami kontruksi oleh dua rezim sebelumnya. Islam sebagai agama memiliki peran penting dalam proses konstruksi identitas etnik Tionghoa khususnya di komunitas muslim Tionghoa Masjid Lautzhe kota Bandung.

Untuk melihat sejauh mana peran agama dalam hal ini Islam melakukan negosiasi identitas yang terjadi dalam diri orang Tionghoa Indonesia. Untuk mendapatkan jawaban awal dari maksud di atas, penulis akan mengajukan beberapa pertanyaan,

1. Bagaimana perkembangan Muslim Tionghoa di Kota Bandung?
2. Bagaimana kontruksi identitas komunitas Muslim Tionghoa di Masjid Lautzhe Kota Bandung?
3. Faktor apa saja yang membentuk kontruksi identitas Muslim Tionghoa di Masjid Lautzhe Kota Bandung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan judul penelitian dan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tiga tujuan. *Pertama*, ingin mengetahui sejauh mana perkembangan etnik minoritas Tionghoa Muslim di kota Bandung. *Kedua*, mengungkapkan secara gamblang konstruksi identitas Muslim Tionghoa, mengetahui bagaimana peran agama sebagai agen dalam hal ini agama Islam, Tionghoa dan Indonesia bernegosiasi dalam identitas Muslim Tionghoa. *Ketiga*, bahwa identitas itu

bersifat dinamis tidak kaku dan pasti. Tetapi juga bisa menyesuaikan dengan tuntutan sosial dan kebutuhan kebudayaan lain. *Keempat*, mengungkap secara kritis dan reflektif tentang arti penting identitas mereka sebagai orang keturunan Tionghoa yang Muslim kemudian harus menjadi Indonesia.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Memberikan sumbangsih praktis, bagi siapa saja yang termotivasi dalam mengkaji terhadap etnik minoritas dalam hal ini Tionghoa Muslim.
2. Memberikan sumbangan teoritik bagi pengembangan ilmu sosiologi agama kotemporer dan cultural studies khususnya filsafat kebudayaan.
3. Mengetahui bagaimana apa pentingnya bagi etnis Tionghoa Muslim untuk menjadi warga Indonesia.

#### **E. Hasil Penelitian Terdahulu**

Kajian tentang etnis Tionghoa di Indonesia sudah banyak dilakukan baik oleh kalangan akademisi maupun praktisi. Adapun karya-karya Tulisan Ilmiah yang dijadikan rujukan diantaranya;

1. Buku Afthonul Afif dengan judul *Pergulatan Mencari Identitas Jati Diri*, yang di terbitkan penerbit Kepik, Cimanggis Depok di tahun 2012. Penelitian nya dilakukan hampir 3 sebagai laporan akhir Pasca Sarjana UGM di jurusan Psikologi. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa identitas Tionghoa muslim tidak kaku dan baku. Etnis Tionghoa yang muslim telah sejak lama

membiasakan dalam pola bangunan identitas yang homogen. Identitas homogen tersebut ditemukan afif hasil dari penelitian lapangannya di kota Djogjakarta. Identitas muslim Tionghoa terintegrasi kedalam kategori-kategori yang sangat beragam, bukan lagi identitas totok dan peranakan saja. Salah satu penyebab adalah sejumlah faktor yang melingkupinya. Diantaranya faktor ekonomi, sosial-budaya, rentang usia, gender, pendidikan, tempat tinggal dan sebagainya.

Dalam Penelitiannya afif kemudian melibatkan dalam konteks situasi dan pelibatan pihak yang diteliti dengan sendirinya ikut memberikan batasan-batasan tertentu. Sehingga terkesani hasil penelitian yang sudah dibukukan tersebut, sebagai hasil representasi sebagian golongan Etnis muslim Tionghoa di wilayah tertentu dan tidak secara keseluruhan. Artinya kemudian hasil riset afif tidak memberikan pemahaman dan penjelasan mendetail mengenai proses dan dinamika pembentukan identitas golongan Tionghoa Muslim secara menyeluruh. Begitu pun penggunaan perspektif teoretis dan metode tertentu yang pada kenyataannya juga telah menghasilkan jenis temuan yang lebih spesifik.

2. Studi yang lain adalah Choerul Mahfud, dengan judul *Chinese Muslim Community Development in Contemporary Indonesia: Experiences of PITI in East Java* terbit di jurnal 471 Studia Islamika, Vol. 25, No. 3, 2018. Dalam risetnya Choerul Mahfud menggambarkan bagaimana peran etnik minoritas Tionghoa di Indonesia. Selain menggambarkan peran Tionghoa atas Indonesia, penulis juga meneguhkan bahwa perubahan gerakan sosial dan kebudayaan di kalangan minoritas muslim Tionghoa. Gerakan pembaharuan sosiak,

kebudayaan dan keagamaan tersebut sesuai dengan perubahan konstruksi identitas diri seorang muslim Tionghoa yang tidak bertumpu pada totok dan campuran. Penulis juga menggambarkan bagaimana Tionghoa muslim di Jawa Timur menunjukkan fenomena “Tionghoa Muslim” yang signifikan. Melalui penelusuran sejarah Chengho dan peran masjidnya, dalam pandangan Choerul bahwa Tionghoa yang memeluk Islam sekaligus pada saat yang sama, mempertahankan bahkan menonjolkan identitas keTionghoa-annya. Fakta-fakta unik dalam kontens penelitiannya adalah masih dilestarikannya budaya Tionghoa walaupun mereka sudah beragama Islam.

Fakta unik yang ditemukan dalam penelitian ini adalah perayaan Imlek di masjid yang dimulai pada 2005, disertai tanggapan beragam muslim non-Tionghoa, ikhwal ritual “hibrid” tersebut. Spirit dari fenomena seperti ini bisa pula ditemui pada beberapa masjid yang didirikan oleh beberapa pengurus Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) di beberapa wilayah di Indonesia. Alih-alih memberinya nama yang berbau Arab, masjid tersebut malah diberi nama “Muhammad Cheng Ho”, nama yang mengacu pada tokoh muslim Tiongkok yang melakukan muhibah ke Nusantara beberapa abad silam. Pemilihan nama sekaligus arsitektur masjid yang mengacu pada masjid di Beijing, seolah hendak menegaskan identitas ke-Tionghoa-an para pendirinya.

3. Studi Penelitian yang dilakukan oleh Akh Muzakki dengan judul *etnic Chinese Muslim, In Indonesia an Ufinished Anti Diskrimination*. Di Journal of Muslim Minority affaier, Volumi 30, no 1, maret 2010. Muzakki dalam tulisan tentang Chine di Indonesia, bagaimana mereka membuktikan bahwa tindakan



diskriminasi hingga saat ini masih terasa untuk kaum Tionghoa di Indonesia. Langkah dan upaya untuk mendapatkan keadilan dari negara dan masyarakat di Indonesia etnis Tionghoa juga melakukan persamaan identitas agama. Tidak sedikit Tionghoa melakukan rekonstruksi identitas dengan pola agama akibat harapan untuk menghilangkan tindakan diskriminasi yang diterima mereka. Dalam pendekatan kritik sejarah, Muzakki ingin menegaskan bahwa upaya sistematisasi rejim penguasa yang hingga saat ini masih berusaha membungkam fakta tindakan diskriminasi untuk etnis muslim Tionghoa. Bahkan penguasa juga upaya pembungkaman terhadap Tionghoa muslim terlihat dalam proses islamisasi Jawa. Dia menunjukkan bagaimana pengusaha berusaha membungkam sejarah panjang keterkaitan historis Tionghoa dan Islam di Nusantara. Sehingga memunculkan fenomena dikalangan masyarakat bahwa muslim Tionghoa merupakan fenomena asing, dan memunculkan anomali bahwa keberadaan Muslim Tionghoa di Indonesia disikapi dengan sikap aneh dan merupakan dari budaya luar Indonesia.

4. Selain penelitian yang dilakukan oleh para sarjana non-Tionghoa diatas, ada pula beberapa penelitian tentang Tionghoa muslim yang dilakukan oleh sarjana Tionghoa, diantaranya adalah penelitian Wai Weng Hew yakni, "Negotiating Ethnicity and Religiosity: Chinese Muslim Identities in Post New Order Indonesia, THESES SIS/LIBRARY R.G. MENZIES LIBRARY BUILDING NO:2 THE AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY CANBERRA ACT 0200 AUSTRALIA di tahun 2011. Dalam penelitian Wai Weng Hew menguraikan dan menganalisis munculnya identitas budaya Cina Muslim pasca

Orde Baru di Indonesia. Penulis menggambarkan bagaimana negosiasi etnis Tionghoa yang muslim dalam upaya menelorkan kebudayaan baru. Keberadaan muslim Tionghoa di Indonesia memang menjadi pusat perhatian penulis, karena mereka tidak hanya menelorkan kebudayaan baru tetapi juga negosiasi politik. Agar hasil kerja-kerja mereka dapat di apresiasi pihak berwenang, hingga mereka tak mendapatkan tindakan diskriminasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun secara kuantitas, jumlah Tionghoa Muslim relatif kecil, namun dengan mengkaji identitas mereka dapat membantu kita untuk lebih memahami kebangkitan Islam“ dan”euforia Cina“ di Indonesia saat ini, setidaknya pasca era Orde Baru. Hal yang akan memperluas wawasan dan pemahaman kita di tengah keterbatasan kosmopolitanisme etnis dan agama.

## **F. Kerangka Berfikir**

### **1. Identitas Hibriditas Melampaui Esensialisme dan Antiesensialisme**

Hibriditas memang cara pandang yang berbeda dengan esensialis dan anti esensialis terkait identitas seseorang. Hibriditas menggugat segala bentuk identitas yang kaku, baku dan telah di tetapkan sebelumnya. Dalam esensialis misalnya identitas yang kaku dan baku itu adalah bagian dari etnik tertentu dan dianggap sudah alami. Sementara dalam logika anti esensialis, kekakuan atau kebakuan identitas etnik misalnya Tionghoa itu merupakan bagian dari pilihan bebas.

Sebut saja Karim Oey, tokoh Tionghoa Muslim di Indonesia terlahir dari keturunan etnik Tionghoa, namun dalam hidupnya suka berpindah-pindah mulai

dari timur hingga ke barat. Membuat Kariem Oey harus kehilangan identitas ke-Tionghoa-annya, dia harus berasimilasi dengan kebiasaan kultur, budaya dan politik Indonesia. Namun jika dilihat secara fisik memang Karim Oey memiliki fisik etnik Tionghoa yaitu bermata sipit, berkulit putih juga tingginya sama dengan rata-rata tinggi orang Asia Timur. Bagi orang Indonesia, Karim Oey adalah orang Tionghoa, walaupun Kariem Oey sudah memiliki kartu penduduk Indonesia, sudah berasimilasi kebudayaan, dan lancar berbahasa Indonesia. Begitu juga sebaliknya, bagi orang Tionghoa, sosok Kariem Oey dianggap bukan orang Tionghoa karena dia tidak bisa berbahasa Cina, kultur Tionghoanya sudah tidak ada. Terkait dengan sosok Kariem Oey tersebut, pemahaman esensialis identitas tentu tidak bisa dipakai dalam menjelaskan diatas. Begitu juga dengan pemahaman anti esensialis yang menganggap bahwa identitas seseorang itu adalah pilihan dan bentukan sosial, tak bisa menyelesaikan masalah Kariem Oey walaupun sudah berasimilasi dengan kebudayaan Indonesia dan tidak lagi memiliki identitas Tionghoa, tetapi tetap bagi orang Indonesia Karim Oey itu adalah Tionghoa.

Maka untuk melihat secara bijak dalam kasus identitas Karim Oey, Teori Hibriditas dalam wacana Postkolonial dianggap bisa memadai. Hibriditas memang mempersoalkan batas antar etnis, tetapi tidak menghilangkan sama sekali. Hibriditas mengaburkan batas-batas etnis yang kaku dan baku, tetapi pada saat bersamaan dia mengafirmasi batas identitas yang memiliki pengertian yang mencair. Dalam logika hibriditas tidak ada sesuatu yang murni, semuanya

hasil dari saling mempengaruhi antar berbagai identitas. Tetapi hibriditas juga menolak pemahaman akan identitas yang tidak punya batas sama sekali.

Dalam kajian postkolonial, konsep atau teori hibriditas merupakan salah satu bentuk cara memahami “sesuatu” yang baru.<sup>22</sup> Bahkan Hibriditas di artikan berbagai macam, ada yang mengartikan sebagai sinkretisme, akomodasi atau pencampuran.<sup>23</sup> Orang yang kerap kali mengkaji dari Hibriditas seperti selayaknya berada dalam hutan konsep yang saling berkopetensi untuk saling bertahan.<sup>24</sup> Begitu banyaknya konsep dan arti terkait Hibriditas Penulis mengambil arti bahwa hibriditas dengan apa yang dalam budaya, hibriditas mengacu pada pertemuan dua budaya atau lebih yang kemudian melahirkan sebuah budaya baru, akan tetapi budaya lama tidak ditinggalkan. Hibriditas sebenarnya menunjuk pada penciptaan trans budaya baru yang ada dalam wilayah pertemuan yang dihasilkan melalui kolonialisasi.<sup>25</sup>

Sementara dalam pandangan Homi Bhabha, dalam study kebudayaan kecenderungan studi orang eropa terhadap Asia bersifat Eropa centris dan oposisi biner. wacana-wacana kolonial bukanlah di produk seorang nahkoda kolonial yang serba lengkap dan kuat, tetapi merupakan hasil dari proses hibridasi yang dipicu oleh benturan antara tradisi-tradisi kolonialis dan pribumi. Hal ini mengakibatkan terjadinya apa yang disebut dengan ‘ambivalensi’ di dalam sumber wacana tradisional tentang otoritas dan memungkinkan adanya

---

<sup>22</sup> Budiawan (ed), *Ambivalensi: Postkolonialisme Membedah Musik Sampai Agama di Indonesia*, (Yogyakarta, Jalasutra, 2010). 20

<sup>23</sup> Darwin, Darmawan, *Identitas Hibrid Orang Cina*, (Yayasan LKIS, Yogyakarta, 2014). 49

<sup>24</sup> Burke P, *Culture Hybridity*, (Cambridge, Polity Press 2009). 120

<sup>25</sup> Aschort, B., et.al. *Key Concepts in Postcolonial Studies*. (London: Routledge et.al., 1998). 55

bentuk subversi, ditemukan dalam ketidakpastian, dan merubah kondisi kekuasaan sehingga adanya bentuk intervensi.<sup>26</sup>

Kunci untuk melakukan subversi terhadap wacana-wacana kolonial, menurut Bhabha, dapat ditemukan di dalam *mimesis subversive* kolonialis oleh pribumi yang terjajah.

*Hibriditas adalah nama untuk pembalikan strategis terhadap proses dominasi melalui pengingkaran (produksi identitas yang menjaga identitas otoritas yang asli dan suci). Hibriditas adalah revaluasi asumsi identitas kolonial melalui pengulangan dampak identitas yang diskriminatif. Hibriditas mengganggu tuntutan mimetic atau narsistik kekuasaan kolonial tetapi menjalin kembali identifikasi dengan strategi subversi yang membalikan pandangan kaum yang terdiskriminasi kembali ke mata kekuasaan.<sup>27</sup>*

Figur ambivalen etnik Tionghoa yang berbahasa Tionghoa di Indonesia atau Tionghoa yang berbahasa Indonesia sekaligus pernah di Belanda. Bukti seperti inilah yang ingin diteliti. Bagaimana analisis Bhabha tentang hibriditas itu mewakili bagi sekelompok etnik minoritas untuk dihapuskannya dikotomi identitas pribumi dan nonpribumi, mayoritas atau minoritas atau penjajah-dan yang terjajah. Dalam konteks pemikiran seperti itulah kemudian Homi Bhabha dipakai sebagai pisau analisis bahwa relasi antara yang terjajah dan penjajah atau mayoritas dan minoritas dipahami tidak bersifat oposisi biner, tetapi didalam relasinya ada timbal balik. Artinya bahwa si penjajah tidak pernah bisa sepenuhnya menguasai si terjajah, begitu juga si terjajah tidak pernah sepenuhnya takluk kepada si penjajah. Keadaan seperti ini menurut Bhabha

---

<sup>26</sup> Bhabha Homi, "Sign taken for wonder; questions of ambivalance and authority under a tree in elhi, May 1817", dalam (Critical Inquiry 12.1, 1985), hlm. 144-145.

<sup>27</sup> Bhabha, Homi, "Sign taken for wonders". Lihat Ashcroft et al.(eds), *The Post-colonial Studies Reader*, hlm. 35-36.

melahirkan ruang negosiasi antara keduanya. Dalam ruang negosiasi itulah terjadi apa yang disebut Bhabha dengan Colonial Mimikri.<sup>28</sup>

*Mimikri, thus the sign of a double articulation; a complex strategy of reform, regulation and discipline, which appropriates the Other as it visualizes power. Mimikry is also the sign of the innappropriate, however, a difference or recalcitrance which coheres the dominant strategic function of colonial power, intensifies surveillance, and poses an immanent threat to booth normalized'knowledges and disciplinari power.<sup>29</sup>*

*Mimikri dengan demikian adalah tanda dari artikulasi ganda, sebuah strategi yang komplek dari reformasi, regulasi dan disiplin yang "mengapropriasi" Yang Lain sebagaimana ia melukiskan kuasa. Mimikri juga tanda dari "tidak terapropriasi" sebuah perbedaan atau yang liar, yang mengkoherensi fungsi strategi dominan dari kuasa kolonial, mengintensifkan pengawasan dan menyebabkan ancaman yang nyata baik terhadap pengetahuan-pengetahuan yang dinormalkan maupun kekuasaan yang mendisiplinkan.*

Mimikri tidak akan pernah menghasilkan satu identitas yang seragam, identik dan takluk di bawah kekuasaan penjajah. Mimikri sebagai langkah kuasa yang mendisiplinkan tubuh tetapi sekaligus tidak mendisiplinkan. Akibatnya mimikri akan menghasilkan sesuatu yang baru dan familiar, baru dan familiar itulah yang kemudian di sebut dengan identitas Hibrid.

Pengertian Bhabha terhadap apa disebut *neither...nor* atau *bukan yang ini tetapi bukan pula yang itu*, dalam konstruksi kultur atau identitas yaitu "Ruang Ketiga". Ruang ketiga ini adalah cara kemungkinan baru yang melakukan intrufsi. Mengintegrasikan atau mengungkapkan bentuk wajah baru kultural baru. Ruang baru ini seperti halnya ruang negosiasi, ruang dimana

---

<sup>28</sup> Bhabha, Homy, 2004. 50

<sup>29</sup> Bhabha, Homy, 2004. 122-123.

seluruh bentuk budaya secara bertahap saling membaca antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam ruangan ini saling bernegosiasi antara yang kuat dan yang lemah, antara mayoritas dan minoritas antara Tionghoa dan Indonesia. dalam negosiasi antara Identitas Tionghoa dan Identitas Indonesia itu lahir lah ruang baru yang bisa dimengerti dalam proses hibriditas.

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

### 1). Metode Penelitian

Metodologi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kasus (*Case Study*), hal ini dilakukan untuk memperkembangkan pengetahuan yang mendalam tentang objek yang ditelitinya.<sup>30</sup> Metode ini di gunakan atas dorongan rasa ingin tahu dari objek yang ditelitinya. Untuk menemukan dan mengungkap data yang diinginkan oleh penulis. Metode ini dipakai karena memiliki ciri khas yaitu pendekatan dengan bertujuan untuk mempertahankan keutuhan dari objek penelitian. Artinya data yang dikumpulkan dalam rangka studi dipelajari sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yaitu penelitian mendalam mengenai unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan terintegrasi dengan baik.

### 2). Jenis dan Sumber Data

#### a) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data Kualitatif. Hal ini dilakukan untuk memperhatikan prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar atas terwujudnya suatu

---

<sup>30</sup> Vredendregt, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, (Jakarta, Gramedia 1978)..

gejala dalam kehidupan masyarakat, kemudian dianalisis maknanya melalui kebudayaan masyarakat pada umumnya. Hasil dari penelitian ini kemudian dianalisis kembali dengan menggunakan teori-teori yang berhubungan. Sehingga dapat diketahui kemungkinan untuk memperkuat atau menyempurnakan suatu teori tersebut. Berdasar pendekatan ini, maka dalam penelitian ini tidak mengenal adanya populasi dan sample.<sup>31</sup>

Seperti dijelaskan dalam pendekatan kualitatif bahwa penentuan makna terhadap gejala dalam masyarakat adalah dengan dan melalui kebudayaan yang bersangkutan. Maka pendekatan ini dilakukan dengan *emic approach*.<sup>32</sup> Dalam pengertian lain pendekatan tersebut menentukan makna menurut kerangka konseptual sebagaimana yang dimaksud oleh masyarakat yang sedang ditelitinya.<sup>33</sup>

#### b) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer adalah data data yang diperoleh melalui observasi di lapangan baik berupa hasil wawancara dengan informan baik berupa catatan lapangan maupun hasil jawaban dari wawancara yang diperoleh dari informan.<sup>34</sup>

Sumber data primer dilakukan dengan metode *purposive sampling* yaitu peneliti

---

<sup>31</sup> Parsudi Suparlan, *Pengantar Metode Penelitian; Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta; Program Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia, 1986). 45

<sup>32</sup> Pendekatan emik yaitu pendekatan yang berusaha memahami perilaku individu atau masyarakat dari sudut pandang sipelaku sendiri. Study emik memang bersifat lebih privat tidak di generalisasikan secara luas. Upaya ini untuk mengkomunikasikan keadaan internal dan perasaan individu yang berkaitan aktivitas perilaku. Lihat Pertyy J. Pelto, *Antropological Resert : The Structure of Inquiry*, Harper & Row Social Science, New York and London, thn 1970, hlm 65

<sup>33</sup> Kaplan & Mannerrs 1972. Hal: 22

<sup>34</sup> Arikunto Suharsimi, 1987. Hal: 10



memilih informan terbaik dari beberapa informan yang ada yang dianggap mewakili untuk menjawab pertanyaan penelitian ini.

Sebagai sumber data dan informan dalam penelitian ini, penulis sudah menentukan diantaranya adalah Coco Rahmat atau Co Iyung, dia sebagai ketua DKM masjid Lautzche. Coco Irwan Chio atau Co Tjio Wie Hoat, dia mewakili tokoh dan ulamanya dari muslim Tionghoa. Co Hendi adalah pengurus dari yayasan Lautzche dan ketua bidang keagamaan di struktur DKM masjid Lautzche. Co Julius anggota yayasan Lautzche dan jamaah masjid Lautzche, Coco Hendro penggiat muslim di yayasan Lautzche dan kepala bidang Kristologi. Coco Paulus, sebagai ketua bidang kajian keislaman dan anggota Muslim Tionghoa Jawa Barat. Coco Rusli, sesepuh Muslim Tionghoa Masjid Lautzche, Coco Abah, Cici erni, Cici Patia dll sebagai anggota dan jamaah muslim Tionghoa Lautzche kota Bandung.

2. Sumber data sekunder, yaitu data-data penunjang yang diperoleh dari buku-buku pustaka dan tulisan yang berkaitan dengan penelitian diantaranya adalah, Afthonul Afif, *Identitas Tionghoa Muslim Indonesia*, Penerbit Kepik, Cimanggis Depok 2012. Baso Ahmad, *Islam Pasca-kolonial; Perselingkuhan Agama, Kolonialisme dan Liberalisme*, Bandung, Mizan, 2005. Darwin Darmawan , *Identitas Hibrid Orang Cina*, Gading Plubising , Yogyakarta 2014. Dawis, A, *Orang Indonesia Tionghoa Mencari Identitas*, 2010, Jakarta Grafiti. Leela Gandhi, *Teori postkolonia: Upaya Meruntuhkan Hegumoni Barat*, diterjemahkan oleh Yuwan Wahyutri dan Nur Hamidah, Yogyakarta: Penerbit Qalam, 20001, Lukman Lisa, *Proses Pembentukan Subjek Jacques Lacan*,

Yogyakarta, Kanisius, 2011. Madan Sarup, *Post-structuralism and Postmodernism; sebuah Pengantar Kritis*, diterjemahkan oleh Medhy Agnita Hidayat, Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2003. Mudji Sutrisno, Hendar Putranto, *Hermeneutika Pascakolonial Soal Identitas*, Kanisius Jogjakarta, 2004. Martin Lukito Sinaga, *Identitas Poskolonial "Gereja Suku" Dalam Masyarakat Sipil*, Yogyakarta, LKIS, 2004

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan pendekatan yang dilakukan, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik-teknik;

#### a. Observasi dan Observasi Partisipasi

Observasi digunakan untuk mengamati gejala-gejala yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat yang ditelitinya.<sup>35</sup> Untuk menghindari keaburan gejala-gejala mana yang harus diamati dan mana yang tidak harus diamati, maka sasaran pengamatan dibatasi dengan teori-teori yang digunakan pada penelitian ini. Sebab pengetahuan tentang teori tersebut dapat memberikan gambaran mengenai kenyataan-kenyataan yang perlu diperhatikan bila mana hendak mempelajari suatu masalah sosial.<sup>36</sup>

Namun dengan menggunakan observasi saja dianggap tidak cukup, karena itu digunakan observasi partisipasi, yaitu pengamatan dimana peneliti memainkan peranan sebagai partisipasi atau peserta dalam suatu kegiatan dan kebudayaan.

---

<sup>35</sup> Supardi Suparlan, 1986. Hal: 6

<sup>36</sup> Nanang Supriatna, *Tradisi Pengobatan Tradisional Pada Masyarakat Rangkas Bitung Banten*, 2014 Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Hal 6

Namun meski peneliti sebagai partisipan namun diupayakan agar identitas sesungguhnya dari peneliti tidak diketahui oleh seluruh informan.

#### b. Wawancara (Interview)

Penggunaan wawancara bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirannya.<sup>37</sup> Untuk menggali data terkait pemahamannya, maka yang dilakukan penulis adalah dengan cara interview. Diantaranya melakukan wawancara kepada para jamaah, muslim Tionghoa yang aktif di Masjid Lutzhe Kota Bandung. Interview dilakukan bersama empat muslim Tionghoa, mereka adalah ketua yayasan Kariem Oey Cabang Bandung, DKM Masjid, dan dua staf yang memiliki pengaruh dalam kebijakan. Dalam penelitian ini sejumlah pertanyaan bersifat terbuka, supaya narasumber dengan leluasa menjawab sejumlah pertanyaannya atau leluasa saat menyampaikan pendapat dan pandangannya. Untuk validitas data yang ditemukan melalui wawancara, penulis juga akan memeriksa dokumen yayasan mengenai hasil keputusan bersama, terkait pertanyaan-pertanyaan diatas.

#### c. Diskusi Kelompok

Langkah berikutnya adalah membuat kelompok diskusi terbatas antar peneliti dan DKM dan Jamaah Muslim Tionghoa Lautzhe, diskusi diskusi tersebut selalu bertema tentang data dan temuan penulis tentang yang ditelitinya. Sebelum diambil sebagai data valid, digodog dulu dalam diskusi terbatas. Diskusi ini dilakukan agar mendapatkan data informasi kolektif tentang pemahaman-

---

<sup>37</sup> Koentjaraningrat, *beberapa pokok antropologi sosial*, (Jakarta, Dian Rakyat 1985). Hal 30

pemahaman mereka terhadap pertanyaan penelitian. Setidaknya data yang penulis dapatkan dalam observasi dan interview akan didapat dalam diskusi tersebut. Atau sebaliknya data yang di dapat dalam diskusi tersebut dijadikan sebagai data pembanding dari data yang didapatkan dari hasil obervasi dan interview. Dalam metode penelitian modern, data pembanding inilah yang kemudian biasa disebutnya dengan *trianggulasi*. Trianggulasi sangat berguna untuk menjamin validitas data yang di dapat, jika kita menemukan data yang berbeda data meka kemungkinan terakhir data trianggulasi tersebut bisa di dipakai untuk mendapatkan makna yang lebih dalam.

#### 4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data umum yang digunakan adalah metode interaktif, yakni analisis yang dilakukan secara terus menerus selama pengumpulan data di lapangan hingga pengumpulan data selesai dilakukan. Analisis data model interaktif terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Selain itu untuk mencapai kesimpulan pada satuan satuan gejala yang dipahami sebagai suatu kesatuan dengan gejala gejala lain, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis struktur fungsional. Dengan maksud adalah suatu pandangan tentang sistem-sistem sosial budaya yang menekankan bahwa struktur-struktur yang diamati menunjukkan pada fungsi dalam struktur tertentu atau sebaliknya bahwa struktur tersebut menunjukkan pada suatu sistem yang lebih luas.<sup>38</sup> Pendekatan tersebut akan mudah dipahami dengan cara apa yang dikatakan Sills, yang menegaskan bahwa analisis struktur

---

<sup>38</sup> Hunter dan Whitten, 1976. Hal: 373.

fungsional sebetulnya adalah untuk menjawab pertanyaan seputar struktur apa yang ada, kemudian fungsi apa saja yang di tampilkan dalam struktur tersebut, dan fungsi-fungsi apa saja yang dapat disambungkan dalam struktur tersebut.

Berdasarkan pendekatan analisis data tersebut, maka dapat mudah dipahamii institusi agama dilihat sebagai elemen elemen struktur struktur sistem kebudayaan. Dimana setiap elemen atau satuan nya mempunyai fungsi masing masing dalam sistem yang lebih luas. Misalnya Ketua DKM yang menduduki dari institusi kelembagaan keagamaan dijadikan sebagai sistem sosial yang mempedomani atau memiliki sistem budaya tertentu. Maka dengan cara pedoman dua sistem tersebut sebuah analisis data inilah bisa dilakukan

## 5. Tempat dan Waktu Penelitian

### a. Tempat

Penelitian ini akan mengambil lokasi di Kota Bandung, tepatnya di Masjid Lautze jalan Tamblong, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Di Masjid Lautze jalan Tamblong Kota Bandung, lokasi tempat kegiatan keagamaan, kegiatan sosial dan kegiatan lain keturunan etnis Tionghoa.
2. Bandung juga merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki sejarah panjang dengan keberadaan etnis Tionghoa.
3. Bandung sudah dianggap sebagai salah satu kota multi etnis, selain Tionghoa Kristen, Budha, Hidhu dan Kongfucu, minoritas Tionghoa Muslim bagian dari salah satu etnis yang eksis di kota Bandung.

4. Bandung sebagai kota yang dihuni oleh beragam etnis, tentu telah mengalami banyak dinamika yang melibatkan sejumlah komunitas etnis Tionghoa, baik muslim atau Kristen Budha, baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini sudah dilakukan penulis sejak masuk Pasca Sarjana UIN SGD BDG tahun 2017. Sejak itu penulis terlibat aktif dengan sejumlah kegiatan sosial etnis muslim Tionghoa. Kebetulan juga penulis di amanahi dalam mengisi jadwal ceramah atau dialog tentang ke Islaman di DKM masjid Lautzche Bandung. Sebagai laporan terakhir pasca sarjana, hasil penelitian tersebut dituliskan penulis dalam bentuk Tesis.

